

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Cetakan ke2*. Jakarta: BIP.
- _____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.ke-2*. Jakarta: Rajawali Pres.
- _____. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi press.
- _____. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bangun, Zakaria. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Medan: Penerbit Bina Medis Perintis.
- C.ST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia.

- Moh. Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Meruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Impikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017
- Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Jurnal

Malik. “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi* (April 2009).

Nesia Nurrahma Ahadya, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P, “TUGAS KEPALA DESA LEREP DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Hal.3

Makalah

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Konstituional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, Jakarta 27 Nopember 2007 <http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuandantananganpenegakannya.pdf> (diakses pada tanggal 22 Juni 2018)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 26 November 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi> diakses pada 2 Agustus 2018